



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2018

Kata Pengantar

Dalam rangka perwujudan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Secara teknis penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan periode 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Jember.

Dengan berpedoman pada Perubahan Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2016-2021.

Jember, April 2018

**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	30
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	47
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	51
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	58
3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	63

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	66
4.2. Target Kinerja	66
4.3. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan	67
4.4 Strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai RPJMD	68
4.5 Program Prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	69
4.6. Kebijakan umum pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	73

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	76
--	----

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	87
--	----

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2016 – 2021**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana strategis atau Renstra merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Perubahan Renstra menjadi perangkat penting bagi suatu organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya.

Perubahan Rencana strategis atau Renstra SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi SKPD dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan, sifatnya garis besar, jangka pendek maupun jangka panjang, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perubahan perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak, dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Perubahan Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD yang akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa 6 (enam) tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dengan demikian, Perubahan Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021. Karena penyusunan dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka proses penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai tupoksi SKPD.

Perubahan Perubahan Renstra SKPD berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Perubahan Renstra SKPD memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi SKPD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan SKPD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh SKPD.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan SKPD.
5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengeluarkan panduan berupa Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang dibangun dalam 4 (empat) tahapan utama yaitu:

1. Tahap Persiapan

- 1) Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
- 2) Orientasi Renstra SKPD
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

- 1) Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
- 2) Penyusunan profil pelayanan SKPD dan prediksi jangka menengah
- 3) Tupoksi SKPD
- 4) Perumusan Visi dan Misi SKPD
- 5) Evaluasi Renstra SKPD (Renstra SKPD) periode lalu (2010-2015)
- 6) Review Renstra K/L dan Renstra SKPD
- 7) Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
- 8) Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
- 9) Pembahasan Forum SKPD
- 10) Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
- 11) Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

- 1) Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
- 2) Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Renstra SKPD

4. Tahapan Penetapan Renstra SKPD

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan disertai dengan indikasi pendanaan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember dan

dokumen–dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Renstra-SKPD

Pada RPJPD 2005-2025, dalam mendukung Mengembangkan Struktur Ekonomi Berdaya Saing Global, pengembangan pariwisata diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat, mengembangkan dan melestarikan potensi kesenian dan kebudayaan lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat serta mampu membawa dampak peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah. Sedangkan pengembangan kebudayaan diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon secara positif dan produktif terhadap modernisasi sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat guna Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya. Selanjutnya pada RPJPD Tahap Ketiga (2014–2019) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

1.2. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - e) Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - j) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - k) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - l) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
 - m) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan untuk :

- 1.3.1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

- 1.3.2. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Penjabaran RPJMD tersebut diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan, sasaran-sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan di bidang Pariwisata dan kebudayaan.

Sedangkan **Tujuan** disusunnya Renstra adalah :

- 1.3.3. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang berkesinambungan selama kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016-2021 dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).
- 1.3.4. Sebagai acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
- 1.3.5. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang program 5 tahun ke depan

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra-SKPD Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra SKPD, fungsi Perubahan Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra SKPD, keterkaitan Perubahan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

Landasan hukum yang memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra SKPD.

Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember.

Bab ini memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SKPD. Uraian tentang Struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana SKPD (Proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan peluang dan Pelayanan SKPD mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan

terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 6 Tahun mendatang.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan PerubahanRenstra.
- 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran dan sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun PerubahanRenstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota serta ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Dipaparkan review faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD yang menjadikan rumusan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember.
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember.
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan visi dan misi umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, kemudian tujuan dan sasaran jangka menengah untuk mewujudkan visi dan misi, langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, serta arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai, ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber dananya

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

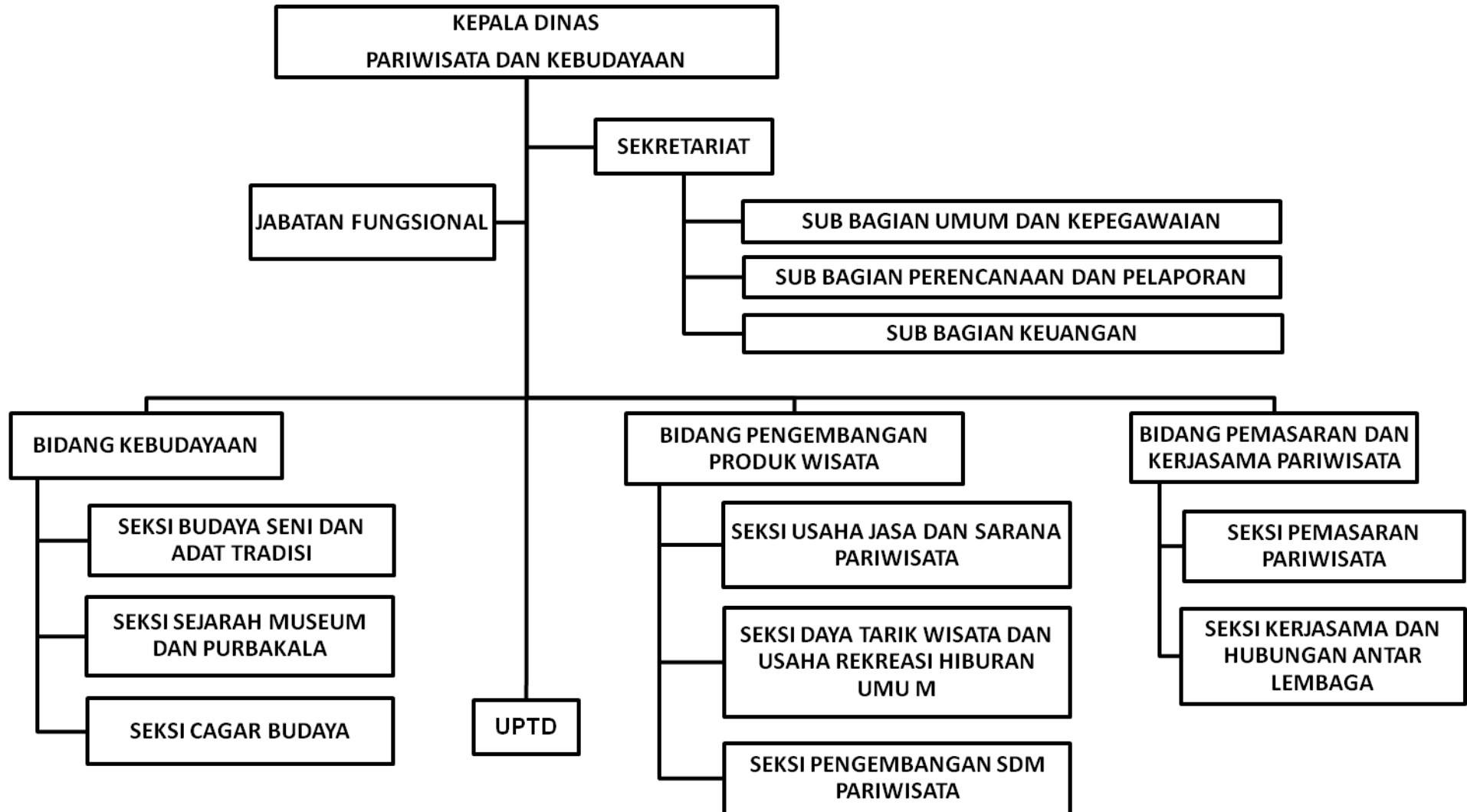
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

2.1. Tugas, Fungsi, dan Strukur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas dan Fungsi

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- b. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
- d. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember



- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata; dan
 2. Seksi Daya Tarik Wisata dan Usaha Rekreasi Hiburan Umum; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Budaya, Seni dan Adat Tradisi;
 2. Seksi Sejarah Museum Purbakala; dan
 3. Seksi Cagar Budaya.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang.

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - d. pengelolaan kearsipan dinas;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan, penerimaan, pendistribusian dan

- pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas;
- b. penyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - e. pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, dan pengelolaan aset;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang- barang inventaris; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan program, kegiatan, anggaran, dan pelaporan sertatugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - b. penyusunan Perencanaan dan program Dinas;
 - c. penghimpunan dan pengolahan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas ke dalam Rencana kegiatan Anggaran;
 - d. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - e. pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;

- f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1.3. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
 - d. penyiapan Surat Perintah Membayar(SPM);
 - e. penyusunan Rekapitulasi Penyerapan Keuangan Sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - g. pengurusan keuangan perjalanan dinas serta biaya-biayalain sebagai pengeluaran dinas;
 - h. pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas;
 - i. penyusunan Neraca Keuangan Dinas; dan
 - j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Bidang Pemasaran Dan Kerjasama Pariwisata

- (1) Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi pengembangan promosi pariwisata;
 - b. melaksanakan pengadaan sarana promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - c. merumuskan strategi pemasaran dalam pengembangan pasar pariwisata; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, *stakeholder* pariwisata serta pelaku usaha pariwisata dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar pariwisata;
 - b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
 - c. Penyiapan bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
 - d. pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1. Seksi Pemasaran Pariwisata

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengadakan analisis terhadap produk wisata, penyebaran informasi serta tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
 - a. perencanaan kualitas informasi dan promosi kepariwisataan di dalam dan luar negeri;
 - b. perencanaan, analisa dan publikasi tentang produk wisata dan budaya;
 - c. pengelolaan system informasi kepariwisataan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pengembangan pemasaran pariwisata;
 - e. penyusunan bahan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan-bahan promosi;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;
 - h. penyusunan laporan tentang pelaksanaan pemasaran pariwisata; dan
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

- (1) Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan antar daerah dan instansi pelaku wisata serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan jaringan kerjasama antar daerah,

- instansi,dan pelaku wisata dalam pengembangan produk pariwisata, promosi pariwisata dan budaya;
- b. penyusunan bahan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata lokal, regional, nasional, maupun internasional;
 - d. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan dan penyiapan bahan distribusi informasi pariwisata pada segmen pasar pariwisata;
 - f. pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata

- (1) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usahajasa, sarana pariwisata, perusahaan Daya Tarik Wisata serta Usaha Rekreasi Hiburan Umum (URHU) dan sumber daya manusia pariwisata sertatugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyiapan bahan untuk menyusun rencana dan petunjuk di bidang pengembangan produk pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, perusahaan daya tarik

- wisata, rekreasi hiburan umum serta sumber daya manusia pariwisata;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan umum evaluasi dan pengawasan di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan Daya Tarik Wisata, Rekreasi Hiburan Umum serta Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - d. pelaksanaan Kerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholder* di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan Daya Tarik Wisata, rekreasi hiburan umum serta Sumber Daya Manusia Pariwisata ;
 - e. pemberian rekomendasi di bidang pengembangan usaha sarana wisata dan rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa pariwisata dan Daya Tarik Wisata serta rekreasi hiburan umum; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3.1. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

- (1) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasi, memverifikasi, dan mengawasi serta mengevaluasi terhadap pelaku usaha kepariwisataan serta tugas lain yang di berikan Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penetapan Standar Usaha Pariwisata para pelaku usaha kepariwisataan;
 - b. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

- para pelaku usaha kepariwisataan;
- c. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha kepariwisataan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap standar usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata ;
- f. pelaksanaan penataan lingkungan sehat di bidang usaha pariwisata; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3.2. Seksi Daya Tarik Wisata dan Usaha Rekreasi Hiburan

Umum

- (1) Seksi Daya Tarik Wisata dan Usaha Rekreasi Hiburan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan perusahaan Daya Tarik Wisata dan Usaha Rekreasi Hiburan Umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Daya Tarik Wisata dan Usaha Rekreasi Hiburan Umum mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana, petunjuk teknis dan bahan rumusan pelaksanaan Perusahaan Daya Tarik Wisata serta Rekreasi Hiburan Umum;
 - b. penyusunan konsep pengelolaan daya tarik wisata;
 - c. penyusunan bahan analisa dan evaluasi pelaksanaan daya tarik wisata;
 - d. perencanaan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP);
 - e. pelaksanaan koordinasi kesepahaman lintas sektor

- dalam pengelolaan KSP;
- f. penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - g. penyusunan pedoman pengelolaan destinasi pariwisata;
 - h. penyusunan rancangan penetapan destinasi wisata;
 - i. pelaksanaan koordinasi kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 - j. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang Ppengusahaan Daya Tarik Wisata serta Rekreasi Hiburan Umum;
 - k. penyiapan bahan fasilitasi PengusahaanDayaTarik Wisata serta Rekreasi HiburanUmum;
 - l. penyiapan penataan dan pelestarian lingkungan usaha Daya Tarik Wisata serta Rekreasi Hiburan Umum;
 - m. penyiapan konsep pengembangan, pendampingan, fasilitasi pembentukan desa wisata;
 - n. penyiapan bahan inventarisasi Usaha Rekreasi Hiburan Umum;
 - o. penyediaan pengusulan dan penyelesaian administrasi dana hibah;dan
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3.3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan, menginventarisir, memonitor, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan bahan pengembangan ketenagakerjaan, pelatihan dan sertifikasi di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan inventarisasi data potensi tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi profesi Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan ketenagakerjaan dan pelatihan di bidang pariwisata;
 - e. penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan kelompok masyarakat dan masyarakat pariwisata;
 - f. pelaksanaan pembentukan kelompok masyarakat pariwisata;
 - g. penyiapan pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bimbingan masyarakat pariwisata;
 - i. pelaksanaan sosialisasi kelompok masyarakat profesi dalam mengembangkan pariwisata;
 - j. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha pariwisata;
 - k. perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang budaya, seni, adat, tradisi, pembinaan sejarah lokal, kepurbakalaan, cagar budaya dan pengelolaan museum daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang nilai budaya, seni, adat, tradisi, sejarah, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/ kota di bidang nilai budaya, seni dan adat tradisi;
 - c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang nilai budaya, seni, adat, tradisi, sejarah, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
 - d. penggalian, pelestarian, pengembangan, nilai budaya, seni, adat dan tradisi;
 - e. pemberian penghargaan dan apresiasi pada pelaku seni dan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - f. pengendalian dan pengawasan budaya asing yang masuk ke Indonesia;
 - g. penyusunan standar dan prosedur kegiatan di bidang museum, kepurbakalaan dan cagar budaya
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya ;
 - i. pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang seni, adat, tradisi, sejarah, museum, kepurbakalaan dan

- benda cagar budaya; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4.1. Seksi Budaya, Seni dan Adat Tradisi

- (1) Seksi Budaya, Seni dan Adat Tradisi mempunyai tugas merancang, menganalisis, mengelola dan melestarikan budaya, seni, adat dan tradisi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budaya, Seni dan Adat Tradisi mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan budaya, seni dan adat tradisi;
 - b. penyusunan konsep pembinaan, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan kebudayaan, seni dan Adat Tradisi;
 - c. penyusunan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pelestari seni tradisi yang ada dimasyarakat;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi;
 - e. penyusunan konsep fasilitas dan inventarisasi kegiatan pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi;
 - f. penyusunan SOP dan pembinaan lembaga budaya, seni, adat dan tradisi yang penganutnya dalam daerah;
 - g. penyusunan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan lembaga budaya, seni, adat dan tradisi;
 - h. penyusunan bahan data dan informasi pembinaan sertafasilitasi kesenian (pelaku, karya, dan

- komunitas/lembaga seni);
- i. penyusunan konsep event, kegiatan dan kebijakan serta kebutuhan pengembangan dan fasilitas insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas/kreatif ;
 - j. penyusunan rencana pengembangan dan ekspansi pasar jenis usaha kreatif;
 - k. penyusunan rencana pengembangan, peningkatan jenis usaha kreatif; Hak Kekayaan Intelektual, ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif dan penguatan kelembagaan serta regulasi di sektor ekonomi kreatif;
 - l. penyiapan bahan revitalisasi pengembangan, *database* tentang nilai budaya, kajian seni dan sistem informasi tentang kebudayaan;
 - m. pelaksanaan inventarisasi dan pembinaan sentra kerajinanrakyat dan karya industri seni budaya;
 - n. pembinaan dan peningkatan kesenian serta pelaku senidaerah;
 - o. penyiapan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama antar daerah dan luar negeri ;
 - p. penyiapan pelaksanaan monitoring implementasi dan pelayanan minimal bidang kesenian;
 - q. pelaksanaan pengusulan dan verifikasi administrasi dana hibah;dan
 - r. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4.2. Seksi Sejarah Museum Purbakala

- (1) Seksi Sejarah Museum Purbakala mempunyai tugas menyusun, merancang, mengembangkan dan

mengelola informasi kesejarahan, museum dan kepurbakalaan serta tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang .

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Sejarah Museum Purbakala mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan, inventarisasi, identifikasi, penyediaan data dan informasi, publikasi bidang sejarah, museum dan purbakala;
 - b. penetapan SOP pembinaan sejarah lokal serta pemberian apresiasi terhadap penulisan sejarah lokal;
 - c. penyusunan dan penetapan bahan SOP fasilitasi museum daerah, pengelolaan museum, pemeliharaan koleksi museum, dokumentasi, kebijakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan museum, pelaporan pelaksanaan pengelolaan museum serta penyuluhan serta penyebaran informasi tentang permuseuman, sejarah dan purbakala;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan museum daerah;
 - e. penyiapan bahan kerjasama penelitian informasi dan peninggalan sejarah, museum dan purbakala dengan instansi terkait;
 - f. penyusunan rekomendasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepurbakalaan dan museum daerah;
 - g. penyediaan pengusulan dan penyelesaian administrasi dana hibah; dan
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas.

4.3. Seksi Cagar Budaya

- (1) Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas menyusun, merancang, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, inventarisasi dan pelestarian bendacagar budaya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Cagar Budaya mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan, inventarisasi, identifikasi, penyediaan data dan informasi, publikasi benda cagar budaya;
 - b. penyusunan dan penetapan SOP registrasi cagar budaya tingkat Daerah dan Nasional, sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya, pendidikan dan pelatihan tim pendaftaran cagar budaya penyediaan data dan informasi cagar budaya, rancangan penetapan cagar budaya, layanan registrasi cagar budaya serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penetapan cagar budaya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan, pemugaran cagar budaya, revitalisasi, adaptasi cagar budaya, publikasi pelestarian cagar budaya, penanggulangan bencana terhadap pelestarian cagar budaya, penyediaan sarana dan prasarana pelestarian cagar budaya, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelestarian cagar budaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan benda cagar budaya;

- e. penyediaan pengusulan dan penyelesaian administrasi dana hibah; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Sistem, Prosedur, Mekanisme

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungannya.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya adalah bahan yang dapat difungsikan untuk proses produksi. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia, Aset/Modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sejumlah 34 orang tenaga PNS terbagi pada :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	: 25 orang
UPTD Patemon	: 2 orang
UPTD Rembangan	: 2 orang
UPTD Kebonagung	: 2 orang
UPTD Watu Ulo	: 3 orang

Untuk tenaga non PNS sejumlah 117 orang terbagi pada :

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	: 9 orang
UPTD Patemon	: 17 orang
UPTD Rembangan	: 47 orang
UPTD Kebonagung	: 34 orang
UPTD Watu Ulo	: 10 orang

Ditambah petugas mengurus pelestarian Benda cagar Budaya yang tersebar di 11 Kecamatan di Jember sejumlah 20 orang yang terinci 10 orang status pegawai BPCB Trowulan Mojokerto dan 10 orang tenaga lokal Jember. Dimana dari 10 tenaga BPCB tersebut 4 org berstatus PNS dan 6 orang non PNS.

Tabel 2.1.

Pegawai Menurut Pangkat Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pembina			
	Pembina Utama Muda IV/c	1	-	1
	Pembina IV/a	1	-	1
	Penata	-	-	-
	Penata Tk. I III/d	2	5	7
	Penata III/c	4	1	5
2.	Penata Muda Tk.I III/b	1	-	1
	Penata Muda III/a	3	-	3
	Pengatur	-	-	-
	Pengatur Tk. I II/d	1	1	2
	Pengatur II/c	-	2	2
3.	Pengatur Muda Tk.I II/b	1	-	1
	Pengatur Muda II/a	1	-	1
	Juru	-	-	-
	Juru Tk. I I/d	1	-	1
	Juru I/c	-	-	-
4.	Juru Muda Tk. I I/b	-	-	-
	Juru Muda I/a	-	-	-
Jumlah				25

Tabel 2.2.

Pegawai Menurut Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1
3	Sekolah Menengah Umum	3
4	D III/ Sarmud	2
5	Strata 1	15
6	Strata 2	4
7	Strata 3	-
Jumlah		25

Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebanyak 9 orang, yaitu 1 orang eselon satu, 3 orang eselon dua dan 5 orang eselon tiga.

Tabel 2.3.

Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	-	3
4.	Kepala Seksi	2	3	5
J U M L A H		6	3	9

2.2.2 Prasarana/Sarana

Prasarana dan sarana perhubungan yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember antara lain gedung dan bangunan dinas diatas tanah seluas meter persegi merupakan asset perhubungan Dinas PU-Pengairan Propinsi Kabupaten Jember sejak otonomi daerah 1999 penggunaannya diperuntukkan Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada Tahun 2015 P3D nya diserahkan pada Dinas pengairan Kabupaten Jember.

Tabel. 2.4.

Aset/Modal Kendaraan Tahun 2016

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Tahun perolehan	Keadaan
1.	Avanza G/1.3	1	2015	baik
2.	Apv	1	2007	baik
3.	Sepeda Motor/Astrea Star	2	1998	sedang
4.	Sepeda Motor Supra	1	2009	baik
5.	Sepeda Motor/Yamaha Mio GT	4	2015	baik

Aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember antara lain, 2 kendaraan R-4 yaitu Mobil Dinas Kepala Dinas/Avanza dan Mobil operasional dinas/APV, serta 7 kendaraan R-2.

Tabel 2.5.

Alat Dinas dan Komunikasi Tahun 2016

No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun perolehan	Keadaan
	Mesin Ketik	1	1997	kurang baik
	Mesin ketik	1	2006	baik
	Mesin ketik	1	2010	baik
	Almari Besi	3	2000	baik
	Almari	2	2012	baik
	Filling Kabinet	4	1997/1998/2003/2010	baik
	Filling Kabinet	1	2015	baik
	Brangkas	1	2012	baik
	Lemari Kaca	1	2012/2015	baik
	Almari Kayu	2	1998/2001	baik
	Lemari Arsip	1	2006	baik
	Meja Kerja Pimpinan	1	1997	baik
	Meja Kerja Eselon IV	4	2006	baik
	Kursi Pimpinan	1	1997	baik
	Kursi Kerja	20	2010	baik
	Meja rapat	12	2012	baik
	Kursi Rapat	48	2012	baik
	Kursi Tamu	2	2000/2001	tahun 2000 kurang baik tahun 2001 baik
	Meja Kerja Setengah Biro	4	1998	baik
	Mesin Penghisap	1	2007	baik

	Debu			
	Mesin Penghisap Debu	1	2014	baik
	Kulkas	1	2010	baik
	Ac	2	2006/2010	baik
	Ac	4	2011	baik
	AC	4	2015	baik
	Kompors gas	1	2010	baik
	Tabung gas	1	2010	baik
	TV '29	2	2007/2009	baik
	TV '29	1	2014	baik
	Gordyn	1 paket	2012	baik
	Tape karaoke	1	1999	baik
	VCD/DVD player	1	2007	baik
	VCD/DVD player	2	2011	baik
	Tangga Stenless	1	2011	baik
	Komputer	4	2001/2004/2006	baik
	Komputer	1	2012	baik
	Komputer	1	2014	baik
	Notebook	4	2009/2010/2012	baik
	Notebook	1	2014	baik
	Notebook	1	2015	baik
	Printer	6	2004/2006/2011/2012	baik
	Printer Warna	1	2015	baik
	Printer Portable	1	2015	baik
	Monitor	1	2015	baik
	Audio Mixing Console 32 Channel	1	2015	baik
	Amplifier Gitar	1	2015	baik
	Amplifier Bass	1	2015	baik
	Amplifier Keyboard	1	2015	baik

	Speaker Active 15 "	1	2015	baik
	Speaker Active Monitor Rec.	1	2015	baik
	Sound Card 8 input	1	2015	baik
	Equaliser Dual Chanel	1	2015	baik
	Audio Prosesor	1	2015	baik
	Headphone	2	2015	baik
	POP fiter microphone	1	2015	baik
	Microphone Cable	2	2015	baik
	Microphone percussion	3	2015	baik
	Microphone Drum	1	2015	baik
	Microphone Recording	1	2015	baik
	Boom Stand/Mic	3	2015	baik
	Mix Floor Stand	4	2015	baik
	Digital Recording	1	2015	baik
	Compact Disc. Recorder	1	2015	baik
	Drum	1	2015	baik
	Cymbal	1	2015	baik
	Keyboard	1	2015	baik
	Bass	1	2015	baik
	Guitar Electric	1	2015	baik
	Guitar Acoustic	1	2015	baik
	Kabel Instrumen	1	2015	baik

Item yang ada pada tabel diatas merupakan beberapa unit yang menggambarkan alat dinas dan rumah tangga yang perolehannya sampai Tahun 2016 dan dapat dipergunakan dengan baik.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jember sebagaimana pasal 3 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan fungsi Organisasi pada hakekatnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan. Kewenangan Kabupaten Jember diurusan kebudayaan meliputi pembinaan dan pengembangan keanekaragaman budaya, kesenian maupun purbakala dan pemrosesan perijinan kesenian yang dilaksanakan melalui program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya. Sedangkan dibidang pariwisata meliputi program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan, program pengembangan destinasi pariwisata.

2.3.1. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Urusan wajib kebudayaan, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui perlindungan keberadaan kawasan dan situs benda cagar budaya, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pelestarian kesenian tradisional, peningkatan kemampuan seniman, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional.

Secara umum pelayanan urusan kebudayaan dapat digambarkan dalam data sebagaimana table 2.6.

Tabel 2.6.

Data Perkembangan Seni, Budaya, dan Cagar Budaya Kabupaten Jember

No	URAIAN	JUMLAH				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Cagar Budaya yang dilestarikan					
1.	Benda Cagar Budaya	100	100	100	100	100
2.	Bangunan Cagar Budaya	27	27	27	27	27
3.	Situs cagar Budaya	10	10	10	10	10
4.	Kawasan Cagar Budaya	2	2	2	2	2

B.	Cagar Budaya yang dimiliki daerah					
1.	Benda Cagar Budaya	366	380	380	401	403
2.	Bangunan Cagar Budaya	8	8	8	8	8
3.	Situs cagar Budaya	10	10	10	10	10
4.	Kawasan Cagar Budaya	2	2	2	2	2
C.	Seni dan Kebudayaan					
1.	Jumlah Group Kesenian	158	216	243	290	310
2.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	7	5	5	5
3.	Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	13	15	16	17	17

Capaian pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui 2 program, yaitu :

1. Program pengelolaan kekayaan budaya, dalam program ini dialokasikan untuk pemeliharaan benda cagar budaya yang ada di 11 Kecamatan serta peningkatan Sumber Daya seniman didalam mengelola sanggar dan kualitas seni pertunjukannya.
2. Program pengelolaan keragaman budaya, dalam program ini dialokasikan untuk inventarisasi group seniman, pendataan kesenian yang ada di Jember, festival kesenian, serta pengiriman duta seni ke luar Jember.

Disamping cakupan melalui program/kegiatan dilakukan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan di Jember. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Pembentukan paguyuban seni budaya baik ditingkat masyarakat maupun ditingkat perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah.
2. Peningkatan peran serta seniman tradisonal dalam pengurusan kartu anggota kesenian.
3. Peningkatan SDM seniman melalui study banding, pemberian penghargaan berupa bantuan langsung keuangan melalui kegiatan pementasan kesenian pada kegiatan bersih desa, suroan, festival, dan pemberian informasi pada publik terhadap keberhasilan yang telah diraih oleh seniman yang melakukan pementasandi dalam maupun di luar Jember.

Kinerja pelayanan menurut indikator SPM Kesenian mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010

tentang Standard Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dan indikator capaian yang harus dicapai meliputi :

- 1). Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian dengan 4 indikator, yaitu : Cakupan Kajian Seni; Cakupan Fasilitas Seni; Cakupan Gelar Seni; Pelaksanaan Misi Kesenian;
- 2). Sarana prasarana dengan 3 indikator, yaitu : Cakupan SDM Kesenian; Cakupan Tempat; Cakupan Organisasi;

Capain SPM Kesenian

PROFIL DAN TARGET SPM BIDANG KEBUDAYAAN (Urusan Wajib)

KABUPATEN/ KOTA : JEMBER

PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	CAPAIAN					TARGET				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian										
a.	Cakupan kajian seni	-	-	-				1	1	1	1
b.	Cakupan Fasilitas seni										
c.	Cakupan Gelar Seni	11	7	3	4	5		7	3	4	4
d.	Misi Kesenian	1	1	1	1	1		1	1	1	1
2.	Sarana dan Prasarana										
a.	Cakupan SDM Kesenian	158	216	243	290	310			368	280	300
b.	Cakupan Tempat	16	16	16	17	17		16	16	16	17
c.	Cakupan organisasi	1	1	1	1	1		1	1	1	1

2.3.2. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Urusan Pilihan yaitu pariwisata melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan keberhasilan tingkat usaha pariwisata meliputi ; ketersediaan restoran, penginapan, dan Daya Tarik Wisata (DTW) yang diperoleh selama 2012 sampai dengan 2016 dan telah menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, sebagaimana tabel berikut :

1. Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.8.
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran
Kabupaten Jember tahun 2012 s.d 2016

No	Capaian pembangunan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jmlh usaha	Jmlh kursi	Jmlh usaha	Jmlh kursi	Jmlh usaha	Jmlh kursi	Jmlh usaha	Jmlh kursi	Jmlh usaha	Jmlh kursi
1	Usaha restoran golongan tertinggi	3	192	3	192	3	192	3	192	3	192
2	Usaha restoran golongan menengah	5	165	5	165	5	165	5	165	5	165
3	Usaha restoran golongan terendah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Usaha rumah makan kelas A	15	488	16	518	15	488	16	518	16	518

5	Usaha rumah makan kelas B	41	613	43	661	41	613	43	661	44	671
6	Usaha rumah makan kelas C	112		118		112		118		121	
7	Usaha rumah makan kelas D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Usaha rumah makan kelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jenis Usaha Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jenis Usaha Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

2.1. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai

persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI

b. Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang

Tabel 2.9.
Perkembangan Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Jember tahun 2012 s.d 2016

No	Jenis Penginapan/Hotel	2012	2013	2014	2015	2016
		Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel
1	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-
2	Hotel Bintang 4	-	-	-	-	-
3	Hotel Bintang 3	2	2	2	2	2
	Jumlah Kamar	145	145	145	145	145
	Jumlah Tempat Tidur	-	-	-	-	-
4	Hotel Bintang 2	-	-	-	-	-
	Jumlah Kamar	-	-	-	-	-
	Jumlah Tempat Tidur	-	-	-	-	-
5	Hotel Bintang 1	1	1	1	1	1
	Jumlah Kamar	22	22	22	22	22
	Jumlah Tempat Tidur	33	33	33	33	33
6	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	36	38	39	44	49
	Jumlah Kamar	1.431	1.603	1.657	1.814	1.874
	Jumlah Tempat Tidur	-	-	-	-	-
7	Total Jumlah penginapan/ Hotel	39	41	42	47	52
	Jumlah Kamar	1.598	1.770	1.824	1.981	2.052

Tahun (n-5) Tahun (n-1)**)

3. Daya Tarik Wisata

Tabel 2.10
Perkembangan Daya Tarik Wisata Kab. Jember
Tahun 2012 s.d. Tahun 2016

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	DTW (Daya Tark Wisata)	Obyek					
	- Alam	Obyek	23	23	23	22	28
	- Budaya	Obyek	7	7	7	7	7
	- Buatan	Obyek	17	18	18	20	25

4. Pertumbuhan Wisatawan

Tabel 2.11.
Pertumbuhan wisatawan, jumlah pameran dan PDRB sektor pariwisata
Kabupaten Jember tahun 2012 s.d 2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kunjungan wisatawan	742.297	830.237	981.741	924.544	1.302.238
	Wisatawan Mancanegara	1.682	1.134	1.212	1.221	2.751
	Wisatawan Nusantara	740.615	829.103	882.414	923.323	1.299.487
2.	Rata-Rata Lama Tinggal	2,75	2,36	2,16	2,24	
3.	Jumlah pameran/expo	4	4	4	1	2
4.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$ % Jumlah total PDRB	6,9 %	7,1 %	7,13 %		

Selain perkembangan yang telah kami sajikan pada tabel di atas, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci dapat kami gambarkan selengkapnya dalam tabel berikut :

Review Pencapaian Kinerja Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2011-2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Kondisi Awal	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Kondisi Akhir	Rasio Capaian (%) pada Tahun				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014		2015	2016	2011	2012	2013
Indikator Kinerja Utama																					
1.	Prosentase peningkatan jml kunj. Wisatawan				20%	20%	20%	20%	20%	10%	9.50%	9%	11.10%	8.40%	15%	12%	48	45	56	42	75
2.	Jml. Kunj. Wisatawan				851,506	919,626	993,196	1,072,651	1,158,463	1,274,309	675,324	742,297	830,237	981,741	924,544	1,302,238	79	81	84	92	80
3.	Jml. Prestasi bidang seni dan budaya				2	2	2	2	2	2	8	3	3	2	0	2	400	150	150	100	-
4.	Jml. Kelompok seni dan budaya				120	140	160	180	200	300	129	158	216	243	290	310	108	113	135	135	145
5.	Jml. even seni dan budaya				3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5	100	100	100	100	100
6.	Jml. Benda cagar budaya yang dilindungi/dilestarikan				200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
Indikator Kinerja Kunci																					
7.	Jml.kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB				10%	10%	10%	10%	10%		6.80%	6.90%	7.10%	7.13%	-		68	69	71	71	
8.	Jml. Penyelenggaraan festival seni dan budaya				4	4	4	4	4	4	9	8	7	5	5	5	225	200	175	125	125
9.	Jml. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya				10	11	12	13	14	16	10	13	15	16	17	17	100	118	125	123	121
10.	Jml. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki daerah				362	364	366	368	370	400	366	366	380	380	401	403	101	101	104	103	108
11.	Jumlah penyelenggaraan pameran/expo				3	3	4	3	3	3	3	3	4	3		2	100	100	100	100	-
Indikator Kinerja Tupoksi																					
12.	Jumlah pengunjung cagar budaya				2,300	2,600	2,900	3,200	3,400		3,923	7,372	14,934	11,280	10,254		171	284	515	353	302
13.	yg digunakan				3	3	4	3	2	2	3	3	4	3	4	4	100	100	100	100	200
14.	Jumlah Tenaga Pemandu yang mendapat pelatihan				50	-	-	50			-	-	50	50	50	50	-				100
15.	Jumlah Tenaga Duta Wisata yang direkrut dan dilatih				24	-	24	-	24		24	-	24	-	24	0	100				100
16.	Jenis Cetakan/ Materi promosi yang dibuat				4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	6	5	100	100	100	125	120

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Evaluasi kinerja anggaran secara umum dapat digambarkan dari perkembangan anggaran dan realisasi anggaran, rasio antara anggaran dan capaian realisasi, serta rata-rata pertumbuhan untuk anggaran dan realisasi. Selama periode 2012 sampai dengan 2016 rata-rata penyerapan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 96% secara rinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kab. Jember tahun 2012 - 2016

NO	URAIAN BELANJA	2012		2013		2014		2015		2016	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	3										
	BELANJA DAERAH										
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	998.897.141,00	957.414.238,00	1.177.625.458,00	971.938.179,00	991.844.691,00	923.738.536,00	1.043.647.165,00	949.286.025,00	1.063.832.350,00	978.516.138,00
	BELANJA LANGSUNG	2.205.388.000,00	2.157.899.902,00	2.497.668.000,00	2.467.365.799,00	2.697.668.000,00	2.626.877.607,00	4.611.668.000,00	4.518.805.162,00	4.676.648.000,00	4.500.436.578,00
	Urusan :										
	Kebudayaan	731.000.000,00	720.930.620,00	866.000.000,00	855.652.500,00	841.500.000,00	827.337.000,00	1.704.940.000,00	1.671.892.755,00	1.631.200.000,00	1.622.620.000,00
	Pariwisata	934.490.500,00	923.769.135,00	1.168.760.500,00	1.162.891.600,00	1.348.760.500,00	1.031.748.000,00	2.075.160.500,00	2.051.865.000,00	2.076.960.500,00	2.019.184.500,00
	Operasional Dinas	539.897.500,00	513.200.147,00	462.907.500,00	448.821.699,00	507.407.500,00	459.892.607,00	831.567.500,00	795.047.407,00	967.887.500,00	858.332.578,00
	J U M L A H	3.204.285.141,00	3.115.314.140,00	3.675.293.458,00	3.439.303.978,00	3.689.512.691,00	3.550.616.143,00	5.655.315.165,00	5.468.091.187,00	5.740.480.350,00	5.748.652.715,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Jember yaitu urusan wajib / kebudayaan. Pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan melalui gelar seni, budaya baik di tingkat kabupaten ataupun luar kabupaten, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut sebagai wujud untuk menumbuh-kembangkan serta menginventarisir berbagai temuan, informasi, partisipasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat seni-budaya agar dapat mengukur capaian dari target kinerja sektor kebudayaan yang ada di Kabupaten Jember.

Pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian khususnya kesenian tradisi tidak mudah dengan pengembangan kesenian kontemporer (seni hasil kreatifitas modern).

Pembangunan kepariwisataan merupakan pembangunan yang memiliki sasaran di usaha pariwisata antara lain : mendorong pengusaha di sektor pariwisata yang dapat membuka kesempatan lapangan kerja, mendorong kreatifitas warga untuk mandiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kab. Jember di samping sebagai meningkatkan PAD.

Tingkat perkembangan pariwisata dapat dilihat dari besaran jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dan pendapatan daerah, serta kemampuan usaha pariwisata dalam menyerap tenaga kerja, memperlihatkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan.

Dari tabel yang telah disajikan dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator kinerja pariwisata mengalami pertumbuhan di tiap tahunnya yang merupakan bukti nyata bahwa pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember.

Rata-rata pertumbuhan akomodasi di Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mencapai 9,12 % dengan jumlah total pada tahun 2016 terdapat 47 hotel. Beberapa alasan kaum pendatang atau wisatawan menginap di hotel adalah untuk melakukan perjalanan bisnis atau sekedar wisata/refreshing menikmati keindahan kota Jember. Untuk penyerapan tenaga kerja sampai pada tahun 2015 terdapat 3.369 orang. Sedangkan kontribusi pariwisata (sub sektor perdagangan, hotel dan restoran)tumbuh sebesar 10,98%. Sedangkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga konstan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 856,1 miliar rupiah.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Renstra K/L (terlampir) dapat diketahui bahwa capaian yang telah diraih merupakan tindak lanjut dari program pada Rencana Strategis yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga hasil dari program yang dilakukan tersebut lebih dikembangkan dan diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sampai kepada pemangku kepentingan baik skala di tingkat kabupaten maupun provinsi. Indikator kinerja yang paling berpengaruh dan signifikan, diantaranya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Kedua indikator tersebut mempunyai peranan dalam pertumbuhan ekonomi di Kab.Jember, selain itu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Hal ini dapat mengatasi permasalahan sosial dengan berkurangnya pengangguran yang ada di Kab.Jember. Di samping itu, perlu adanya upaya untuk mendorong investor berminat mengembangkan investasinya di sektor pariwisata di Kab.Jember, karena potensi Daya Tarik Wisata (DTW) masih cukup tinggi.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dalam

menyelaraskan pembangunan sektor Pariwisata dan Kebudayaan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab. Jember tahun 2015, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48 kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

- a. Kawasan wisata alam, terdapat 6 pantai dan 3 air terjun
- b. Kawasan daya tarik wisata budaya, terdapat 14 jenis wisata budaya
- c. Kawasan daya tarik wisata buatan, 16 jenis wisata buatan

Dalam keterkaitannya dengan Kepariwisata pembangunan kepariwisataan perlu adanya kerja sama selain dengan pemangku kepentingan juga dengan SKPD terkait misalnya ; DPU Bina Marga (terkait infrastruktur sarana dan prasarana jalan), DPU Cipta Karya (terkait kebutuhan penerangan), Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan tak lupa dukungan masyarakat sekitar obyek wisata.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan kepariwisataan harus mempertimbangkan terhadap kondisi geografis lingkungan tempat didirikannya usaha pariwisata agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

ANALISIS SWOT SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

<p><u>KEKUATAN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan kuat dari pemerintah daerah 2. Memiliki destinasi wisata pegunungan dan pantai 3. Memiliki Puslit Kopi dan Kakao (satu-satunya di Indonesia) 4. Memiliki bandar udara 5. Memiliki brand “Jember kota tembakau” 6. Memiliki brand “Jember Kota Karnaval Kelas Dunia” melalui JFC 7. Memiliki karakter budaya pendhalungan paling kuat di area tapal kuda 8. Memiliki banyak peninggalan megalitikum (1000 SM) 9. Dilewati oleh JLS (jalur lintas selatan) Jawa Timur 10. Memiliki lokasi strategis sebagai sentra ekonomi di area tapal kuda 11. Memiliki produk ekonomi kreatif kualitas ekspor dari Balung 	<p><u>KELEMAHAN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brand tembakau saat ini menjadi isu yang resistan di dunia 2. Minimnya jadwal dan rute penerbangan ke Jember 3. Kurangnya kesiapan destinasi wisata dalam menerima tamu asing 4. Belum memiliki <i>Tourism Information Centre</i> (TIC) 5. Belum memiliki tempat/panggung/gedung pertunjukan 6. Belum memiliki museum/galeri 7. Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan JFC 8. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Sadar Wisata 12. Pengembangan pariwisata masih belum terintegrasi dan bersinergi 13. Lemahnya pemasaran produk pariwisata di pasar utama khususnya kawasan asia dan eropa
<p><u>KESEMPATAN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi wisata pegunungan dan pantai 2. Pengembangan produk unggulan Puslit Kopi dan Kakao 3. Pengembangan bandar udara sebagai bandara perintis kunjungan wisatawan alternatif yang menghubungkan Bali-Ijen-Bromo-Yogya 4. Pengembangan kota fashion yang berkelas dunia dengan brand utama Jember Fashion Carnival sebagai produk budaya unggulan 5. Pengembangan paket wisata budaya pendhalungan yang beraneka ragam 6. Pengembangan paket dan pasar wisata pre history berbasis budaya megalitikum 7. Pengembangan jalur wisata nusantara yang menghubungkan JLU (jalur Lintas Utara) dan JLS (jalur lintas selatan) Jawa Timur untuk transit pasar domestik dan wisatawan mancanegara 8. Menjadi pusat sentra ekonomi berbasis produk lokal di Jawa Timur bagian timur 9. Pengembangan produk lokal menjadi produk ekonomi kreatif kualitas ekspor 	<p><u>ANCAMAN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brand Jember sebagai kota tembakau memberikan kesan bukan sebagai kota fashion maupun kota ekonomi kreatif 2. Minimnya jadwal dan rute penerbangan ke Jember mengancam target kunjungan wisata dan berpengaruh pada PDRB maupun PAD dari sektor pariwisata 3. Kurangnya kesiapan destinasi wisata dalam menerima tamu asing akan mengakibatkan pihak travel agent mengalihkan ke destinasi lain 4. Belum adanya tempat/panggung/gedung pertunjukan / museum / rumah budaya mengakibatkan paket wisata yang ada hanya berkisar wisata alam belum kearah wisata budaya 5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Sadar Wisata mengakibatkan turunnya kualitas destinasi wisata serta memberikan nilai negatif dimata wisatawan 6. Pengembangan pariwisata yang masih parsial mengakibatkan persaingan harga dan pemasaran diantara penyedia jasa pariwisata di Kab. Jember

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sesuai tugasnya merupakan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat dirumuskan antara lain :

a. Kebudayaan

1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat;
2. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah;
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;

b. Pariwisata

1. Kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Jember, menjadikan tumpang tindih dengan instansi lainnya;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, sehingga daya saing destinasi wisata di Kabupaten Jember masih rendah.
3. Kurang memadai aksesibilitas menuju destinasi wisata (transportasi, amenities, infrastruktur) yang menjadi tanggung jawab bersama antar

SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jember dalam mewujudkannya;

4. Kurangnya kualitas dari kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan berasal dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal daerah yang menimbulkan banyaknya tenaga dari luar daerah yang menempati posisi strategis dalam sektor usaha pariwisata.
5. Jarak tempuh antar destinasi wisata yang cukup jauh sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang saat melakukan perjalanan wisata
6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2016-2021 adalah JEMBER BERSATU (BERSINERGI) MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI.

Misi yang dicanangkan yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agro-industri dan industrialisasi secara berkelanjutan

Dari tiga misi tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan Misi nomor **2** dan **3**.

Pembangunan Kabupaten Jember harus disertai peningkatan akhlak mulia melalui peningkatan kualitas pemahaman agama dan kerukunan kehidupan beragama, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesalehan sosial, dan menuntun individu lebih mampu membangun kerukunan hidup antar umat beragama, memahami prinsip-prinsip

kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Masyarakat Kabupaten Jember yang lebih sejahtera dan lebih mandiri akan berimplikasi pada meningkatnya kemampuan daya saing, terutama menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2016, dimana persaingan yang terjadi bukan lagi antar negara, tetapi antar unit produksi. Penguatan daya saing tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi terutama keunggulan kompetitif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama menyangkut peningkatan manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam menghadapi ASEAN Socio-Cultural Community, perlu memperkuat daya saing kebudayaan lokal agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun kebudayaan asing lainnya. Pada akhirnya kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya kita tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu

- a. Misi nomor 2 yaitu :**Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.** Dimaksudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan dan merata, dimana kemakmuran bagi semua orang, bukan sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau yang termarginalisasi. Upaya Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain dapat terlihat dari terbukanya daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, meningkatnya kemampuan beberapa daerah wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, meningkatnya pelayanan pada wisatawan, menurunnya angka pengangguran, dan meningkatnya iklim investasi pariwisata. Selanjutnya terlihat pula adanya peningkatan kemampuan

wilayahdalam menangani pembangunan sektor pariwisata di wilayahnya masing-masing.

- b. Misi nomor 3 yaitu : **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-Industri Dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.** Dimana dalam penjabarannya diamanatkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata 2014-2019 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disparbud Kabupaten Jember dengan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, yaitu :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Rencana Akhir Renstra Disparbud Kabupaten Jember 2016 - 2021
Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah ;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu dan sinergis secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif

4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Dalam rangka mencapai visi Kementrian Pariwisata 2015 - 2019 posisi strategis pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan bidang kepariwisataan bersinergis dalam berkontribusi memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pariwisata baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan kerjasama sektoral daerah dengan provinsi dan kementrian untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah. Agar penyusunan rencana sasaran bidang pariwisata serta arah kebijakan dan strategi sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015—2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing daerah dengan propinsi dan kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

B. Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 yaitu :

**“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong
Royong”**

Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019, yaitu :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat,
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan,
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu,

4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa,
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Sebagaimana disebutkan dalam Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terdapat elemen ekosistem kebudayaan yaitu:

1. Terwujudnya pemahaman pluralitas sosbud dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam keanekaragaman),
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah (nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air),
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, inovasi, produksi serta pengembangan ilmu dasar dan terapan sesuai dunia usaha dan industri/keunggulan lokal),
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible), maupun tak benda (intangible),
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia,
6. Tingginya apresiasi keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional lebih banyak,
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut yaitu pada misi ke 4 (empat), sektor kebudayaan dalam mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa mengandung makna bahwa :

1. menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
2. membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;

3. meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
4. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Untuk itu agar penyusunan rencana sasaran bidang kebudayaan serta arah kebijakan dan strategi sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015—2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing daerah dengan propinsi dan kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kebudayaan. Disamping menelaah Renstra Kementerian maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2014 - 2019 Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita dari visi dan misi yang sudah ditetapkan.

C. Telaahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Visi 2014-2019:

“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkarakter dengan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan”

Misi :

1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas,
2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya

Tujuan :

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya
3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Fokus pembangunan Kabupaten Jember pada tahun 2011-2035 sesuai dengan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal.

Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang berkelanjutan dilakukan dengan strategi :

- a. Mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan;
- b. Mengembangkan agrowisata;
- c. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
- d. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;

- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;

Arahan pengelolaan Kawasan peruntukan pariwisata meliputi :

- a. Pengembangan kawasan pariwisata dapat dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember;
- b. Pelengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan dan keamanan setiap kawasan daya tarik wisata;
- c. Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata;
- d. Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
- e. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya dilakukan dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang mengapresiasi nilai tersebut melalui:

- a. Pelestarian kawasan sosial dan budaya;
- b. Pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan;
- c. Peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan
- d. Pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah

Dalam upaya pengembangan tersebut yang berkaitan dengan kebijakannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berada pada :

- Kebijakan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah, dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah; pengembangan kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk menghasilkan nilai tambah bruto dari produk lokal.

- Kebijakan pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan kawasan tertinggal untuk mendorong kawasan yang belum berkembang potensi ekonominya maupun kondisi kesejahteraan masyarakatnya.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi masyarakat yang religus dan pluralis menyebabkan kepariwisataan Jember membutuhkan perencanaan, pemasaran dan koordinasi yang kuat dengan berbagai *stakeholder*. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Jember diarahkan pada peningkatan kualitas, pemasaran obyek pariwisata, kunjungan wisata, pelayanan pariwisata dan kelestarian obyek pariwisata. Jumlah wisatawan dalam kurun waktu 2011– 2015 dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

Perkembangan Jumlah Wisatawandi Kabupaten Jember Tahun 2012 –2016

TAHUN	WISMAN	WISNUS
2012	1.018	741.279
2013	1.134	829.103
2014	1.212	882.414
2015	1.221	923.323
2016	2.751	1.299.487

Karakteristik wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya Kabupaten Jember merupakan potensi bagipengembangan pariwisata khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional. Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan.

Pariwisata termasuk kedalam kategori jasa lainnya dalam kontribusinya terhadap PDRB yang meliputi: Akomodasi, Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi. Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Jember tahun 2011 sebesar 675.324, pada tahun 2012 sebesar 1,33% meningkat menjadi 1,36% pada Tahun 2013, kemudian turun pada tahun 2014 menjadi 1,33%, dengan pertumbuhan sebesar 6,64 persen, melambat dibanding tahun 2013 yang tumbuh 6,73 persen

Gambaran kegiatan sektor pariwisata juga dapat dipantau melalui jumlah

obyek wisata di Kabupaten Jember yang berjumlah 49 objek wisata menurut jenis obyek wisata. Dari 49 obyek wisata di Kabupaten Jember, terdapat 22 obyek wisata alam, 20 obyek wisata buatan, dan 7 obyek wisata budaya.

No.	Nama ObyekWisata	Kecamatan	JenisObyek Wisata
1.	Pantai Watu Ulo	Ambulu	Wisata Alam
2.	Pantai Papuma	Wuluhan	Wisata Alam
3.	Pantai Paseban	Kencong	Wisata Alam
4.	Pantai Puger	Puger	Wisata Alam
5.	Pantai Rowocangak	Ambulu	Wisata Alam
6.	Pantai Kepanjen	Kencong	Wisata Alam
7.	Pantai Payangan	Ambulu	Wisata Alam
8.	Pantai Bandealit	Tempurejo	Wisata Alam
9.	Air Terjun Panduman	Jelbuk	Wisata Alam
10.	Air Terjun Pasaran	Sumberjambe	Wisata Alam
11.	Air Terjun Lereng Raung	Sumberjambe	Wisata Alam
12.	Air Terjun Antrokan Sbr Lesung	Ledokombo	Wisata Alam
13.	Air Terjun Tancak	Panti	Wisata Alam
14.	Air Terjun Manggisan	Tanggul	Wisata Alam
15.	Air Terjun Watu Ondo	Tempurejo	Wisata Alam
16.	Air Terjun Sumberkalong	Mayang	Wisata Alam
17.	Pantai Nanggalan	Tempurejo	Wisata Alam
18.	Perkebunan Garahan	Silo	Wisata Alam
19.	Goa Pertapaan	Jelbuk	Wisata Alam
20.	Air Terjun Summersalak	Ledokombo	Wisata Alam
21.	Air Terjun Antrokan Gn Rayap	Arjasa	Wisata Alam
22.	Air Terjun Tancak Tulis	Tanggul	Wisata Alam
23.	Pemandian Rembangan	Arjasa	Wisata Buatan
24.	Pemandian Kebon Agung	Patrang	Wisata Buatan
25.	Pemandian Patemon	Tanggul	Wisata Buatan
26.	Pemandian Kucur	Wuluhan	Wisata Buatan
27.	Taman Botani Sukorambi	Sukorambi	Wisata Buatan
28.	Taman Rekreasi Oleng Sibutong	Arjasa	Wisata Buatan
29.	Perkebunan Gunung Gambir	Sumberbaru	Wisata Buatan
30.	Industri Bobbin (PTPN X)	Arjasa	Wisata Buatan
31.	Loko Tour	Silo	Wisata Buatan
32.	Pabrik Gula Semboro	Semboro	Wisata Buatan
33.	Pemandian Kimo	Sumbersari	Wisata Buatan
34.	Wisata Agro Gunung Gunitir	Silo	Wisata Buatan
35.	Lapangan Golf Glantangan	Tempurejo	Wisata Buatan
36.	Wisata Agro Glantangan	Tempurejo	Wisata Buatan
37.	Pontang Jaya Swimming Pool	Ambulu	Wisata Buatan
38.	Pemandian Niagara	Ambulu	Wisata Buatan
39.	Puslit Kopi dan Kakao	Rambipuji	Wisata Buatan
40.	Mumbul Garden	Mumbulsari	Wisata Buatan
41.	Tiara Jember Park	Sumbersari	Wisata Buatan
42.	Dira Park	Ambulu	Wisata Buatan
43.	Tanoker	Ledokombo	Wisata Budaya
44.	Tugu Mastrip dan Wana Wisata	Jelbuk	Wisata Budaya

45	Tugu Mastrip I dan II	Jelbuk	Wisata Budaya
46	Kuburan Agung	Jelbuk	Wisata Budaya
47	Situs Duplang	Arjasa	Wisata Budaya
48	Situs Seputih	Mayang	Wisata Budaya
49	Kerajinan Sangkar Burung	Kalisat	Wisata Budaya

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.6.1. Isu Strategis Sektor Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jember

ISU STRATEGIS :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat masyarakat terhadap pelestarian kebudayaan lokal 2. Pengembangan sektor pariwisata belum dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak 3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya 			
VISI : Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri			
MISI 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-Industri Dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan			
TUJUAN : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata			
Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
S1 : Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari (<i>average expenditure per tourist per day</i>)	Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana di destinasi wisata	Pengembangan destinasi pariwisata unggulan
	Persentase kegiatan seni budaya yang terpelihara	Pementasan kesenian di taman publik dan acara pemkab	Mengadakan pelatihan, workshop, bimtek, sarasehan bagi para seniman
S2 : Meningkatkan Kelestarian Budaya	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara	Perbaikan pengawetan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi	Berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur

3.6.2 Isu-isu Strategis

Isu Regional

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan bidang telekomunikasi dan transportasi menuntut adanya regionalisasi ekonomi bagi Kabupaten Jember dengan pelbagai negara yang diharapkan mampu mendorong kinerja industri melalui peningkatan jumlah ekspor, jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja profesional dan berdaya saing yang berasal dari masyarakat lokal. Maka tantangan yang timbul adalah perdagangan bebas serta munculnya non tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, ECO Labelling, HACCP dan lain-lain. Oleh karena itu diharapkan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam pelbagai sektor dalam menghadapi kondisi tersebut.

Isu Nasional

Berbagai kondisi ekonomi yang tidak menentu menimbulkan semakin besarnya subsidi dan instabilitas harga komoditi, situasi pangan yang tidak lebih baik mengakibatkan Indonesia masuk dalam “Jebakan impor pangan”; Implementasi Undang-undang Desa dalam lingkup kewenangan Kabupaten merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Jember memberikan fasilitasi agar Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Jember mampu mengelola keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku melalui kegiatan pemberdayaan, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai verifikator menangani pengusulan bantuan keuangan bagi desa wisata yang menerima PNPM Mandiri, Penerapan SPM, peningkatan kapasitas SDM bidang pariwisata yang tidak menimbulkan kesenjangan gender, dinamika dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang harus dikoorKantorikan antar pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga dapat ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Isu Internasional

Isu strategis secara internasional yang berkaitan dengan Pariwisata dan Kebudayaan antara lain :

a. Arus globalisasi (budaya global)

Masuknya unsur-unsur budaya asing, baik itu berupa ideologi baru, gaya hidup baru, teknologi baru, telah memicu terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagian perubahan ini telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang negatif, sebagian lagi telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang positif.

Semakin dipengaruhinya pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma kehidupan masyarakat lokal oleh budaya global. Budaya global menjadi pesaing dan ancaman budaya nasional dan budaya lokal.

Budaya global yang dari satu sisi terlihat sebagai pesaing, sebagai ancaman, sedang dari sisi yang lain terlihat sebagai mitra dan sumber inspirasi pembangunan kebudayaan yang sangat luas dan bermanfaat.

b. Persaingan dalam menciptakan destinasi pariwisata

Belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing di pasar global dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur. Untuk meningkatkan kemampuan destinasi bersaing di pasar global dalam menarik wisatawan, diperlukan upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi dan informasi pariwisata dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman berada di daerah wisata.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan pembangunan pariwisata sebagaimana RPJMD adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kunjungan wisata dan meningkatnya kualitas seni dan budaya. Berpedoman pada tujuan dan sasaran pada RPJMD, maka untuk mewujudkan visi pembangunan pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jember 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan, indikator tujuan dan target pada akhir periode diuraikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1.
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target pada akhir periode

Tujuan	Indikator Tujuan	Target pada akhir periode
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor pariwisata	PAD Sektor pariwisata	35.000.000.000

4.2. Target Kinerja

Target kinerja disusun sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan beberapa sasaran strategis yang disesuaikan dengan sasaran Bupati Jember.

Target kinerja yang berisi sasaran, indikator sasaran dan target tahunan selama 5 tahun diuraikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Sasaran, indikator sasaran dan target tahunan selama 5 tahun

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari selama perjalanan (<i>Average EXPENDITURE per TOURIST per Day</i>)		690.000	766.000	851.000	945.000
Meningkatkan Kelestarian Budaya	Prosentase kegiatan seni budaya yang terpelihara	7 %	10 %	13 %	15 %	18 %
	Prosentase Bangunan Cagar Budaya yang terpelihara	60%	65%	70%	75%	80%

4.3. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata sebagaimana RPJMD adalah :

- a). meningkatkan sektor pariwisata secara integratif dan berdaya saing global;
- b). meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya, serta melestarikan warisan kebudayaan lokal. Sedangkan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata adalah :
 - 1). Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan;
 - 2). Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional;

- 3). Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata;
- 4). Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing;
- 5). Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat;
- 6). Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar;
- 7). Peningkatan penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional;
- 8). Peningkatan pengembangan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal.

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD (sesuai RPJMD)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pembangunan Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Jember ditempuh dengan strategi adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat.
Diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar obyek wisata dan pemberian penyuluhan sadar wisata.
- b. Pengembangan pasar wisata
Diarahkan pada peningkatan jumlah arus kunjungan wisata pada obyek-obyek wisata yang diminati.
- c. Pengembangan pelestarian nilai-nilai budaya
Diarahkan pada peningkatan sarana/prasarana fisik di beberapa situs peninggalan sejarah.
- d. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah.

- e. Pengembangan kemitraan
Diarahkan pada peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja dibidang pariwisata dan dapat terlaksananya kepesertaan usaha jasa pariwisata dalam festival-festival.
- f. Pengembangan destinasi pariwisata
Diarahkan pada peningkatan jenis paket wisata unggulan di Jember sehingga dapat memberikan peluang terhadap kesempatan usaha serta dapat memperluas lapangan kerja dibidang pariwisata.
- g. Pengembangan pemasaran pariwisata
Diarahkan pada pemetaan potensi wisata agro, peningkatan jaringan kerja sama promosi pariwisata melalui TI, pameran obyek wisata dan budaya, pengiriman duta wisata Jember dalam pemilihan duta wisata Kabupaten Jember, pengenalan potensi wisata Jember pada duta wisata luar daerah, pelatihan pemandu wisata serta koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.

4.4. Program Prioritas Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jember sebagai penyelenggara pada urusan pariwisata dan kebudayaan memprioritaskan program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan, peningkatan obyek dan daya tarik wisata alam, buatan, agro dan budaya dilakukan lebih optimal terencana terpadu, dikemas secara profesional sehingga mampu meningkatkan nilai jual baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara
2. Meningkatkan pemasaran dan penyuluhan pariwisata yang meliputi pembuatan paket-paket wisata, marketing obyek dan daya tarik wisata yang melibatkan masyarakat pariwisata sekitar obyek wisata dalam kapasitasnya sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan jasa pariwisata sebagai pendukung akomodasi kegiatan industri pariwisata dengan melakukan penerbitan, pembinaan dan peningkatan mutu sebagai landasan standar pelayanan terhadap wisatawan.

4. Keamanan dan kenyamanan serta kenangan daerah tujuan wisata dapat mengangkat citra dengan kesan sebagai daerah wisata budaya yang religius.

Tabel 4.3
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal periode renstra		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Strategi mencapai tujuan dan sasaran		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	program
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor pariwisata	PAD Sektor pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari (<i>Average Expenditure per Tourist per Day</i>)				690.000	766.000	851.000	945.000	Pameran pariwisata skala nasional maupun internasional	Pengembangan pasar wisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata
											Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana di destinasi wisata	Pengembangan destinasi pariwisata unggulan	Pengembangan destinasi pariwisata	
			Meningkatkan Kelestarian Budaya	Prosentase kegiatan seni budaya yang terpelihara	5 %	5 %	7 %	10 %	13 %	15 %	18 %	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM sanggar seni	Mengadakan workshop/bimtek/sarasehan	Program pengelolaan kekayaan budaya
				Prosentase Bangunan Cagar Budaya yang terpelihara	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	Melakukan perbaikan dan/atau mengawetkan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi	Mengadakan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	Program pengelolaan kekayaan budaya

Tabel. 4.4. RPJMD

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Awal	Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal RPJMD		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Kondisi kinerja RPJMD
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri Dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	PAD sektor pariwisata	5,36	5,62	Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Kontribusi PAD sektor Pariwisata	3,3 %	3,0 %	4,7 %	5,4 %	6,1 %	6,8 %	7,5 %	7,5 %

4.5. Kebijakan Umum pengelolaan Keuangan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember

Anggaran belanja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 digunakan untuk pelaksanaan 2 urusan, yaitu urusan wajib (kebudayaan) dan urusan pilihan (Pariwisata) yang dituangkan dalam 11 program kerja dan 37 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.740.480.350,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.478.652.716,00 atau mencapai 95,44% dari pagu anggaran. Adapun rincian realisasi belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.063.832.350,00	978.516.138,00	91,98
	Belanja Pegawai	1.063.832.350,00	978.516.138,00	91,98
B.	BELANJA LANGSUNG	4.676.648.000,00	4.500.136.578,00	96,23
I.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	134.200.000,00	134.150.000,00	68,78
1.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	134.200.000,00	134.150.000,00	99,96
II.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	182.800.000,00	180.750.000,00	98,88
2.	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	182.800.000,00	180.750.000,00	98,88
III.	Program Pengelolaan keragaman Budaya	1.497.000.000,00	1.488.470.000,00	99,43
3.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	869.700.000,00	861.820.000,00	99,09
4.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	627.300.000,00	626.650.000,00	99,90
IV.	Program Pengembangan Kemitraan	488.427.500,00	440.249.500,00	90,14
1.	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	55.600.000,00	47.700.000,00	85,79
7.	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	191.377.500,00	189.750.000,00	99,15
8.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	179.850.000,00	161.620.000,00	89,86

9.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	61.600.000,00	41.179.500,00	66,85
IV.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	773.559.500,00	695.584.716,00	89,92
5.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	58.500.000,00	48.704.622,00	83,26
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00	6.999.950,00	100,00
7.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
8.	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.500.000,00	10.278.000,00	76,13
10.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00
11.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	226.750.000,00	174.267.500,00	76,85
12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	4.140.000,00	69,00
13.	Penyediaan makanan dan minuman	58.959.500,00	48.383.500,00	82,06
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	102.790.000,00	102.781.144,00	99,99
15.	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
16.	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/ Kedinasan	136.460.000,00	136.430.000,00	99,98
IV.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	152.974.500,00	123.393.862,00	80,66
17.	Pembangunan Gedung Kantor	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00
19.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
20.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	76.474.500,00	46.893.862,00	61,32
21.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
V.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.853.500,00	19.853.500,00	100,00
22.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Kopri/Pakaian Olahraga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	19.853.500,00	19.853.500,00	100,00
VI.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.200.000,00	15.300.000,00	88,95

23.	Penyusunan laporan capaian kinerja (Lakip) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.300.000,00	4.200.000,00	97,67
24.	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	4.300.000,00	3.700.000,00	86,05
25.	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	4.300.000,00	3.700.000,00	86,05
25.	Penyusunan DPA SKPD	4.300.000,00	3.700.000,00	86,05
VII.	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	4.300.000,00	4.200.000,00	97,67
26.	Penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan lainnya	4.300.000,00	4.200.000,00	97,67
VIII.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.406.333.000,00	1.398.185.000,00	99,42
27.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	215.000.000,00	213.550.000,00	99,33
28.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	543.933.000,00	540.235.000,00	99,32
29.	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	125.000.000,00	124.550.000,00	99,64
30.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	522.400.000,00	519.850.000,00	99,51
	Total	5.740.480.350,00	5.478.652.716,00	95,44

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian dari program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Program prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas fungsi, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana program prioritas RPJMD terbagi ke dalam urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata.

Urusan Wajib Kebudayaan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya, indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah peserta sosialisasi dan internalisasi nilai – nilai budaya, Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan wawasan kebangsaan, Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara, Jumlah koleksi museum yang dikelola
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah fasilitasi pagelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman.

Urusan Pilihan Pariwisata

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Jumlah pergerakan (kunjungan) wisatawan nusantara
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara, Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Kabupaten Jember sebesar 2,02 % menurut lapangan usaha dalam penyediaan akomodasi dan makan.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, indikator yang akan dicapai yaitu jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor formal dan non formal bidang kepariwisataan, jumlah masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat.
4. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikatornya yang akan dicapai adalah jumlah peningkatan pelayanan adminitrasi perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara, indikatornya yang akan dicapai adalah jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (rekondisi gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran/gedung)
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah, indikatornya yang akan dicapai adalah jumlah peningkatan kapasitas SDM
7. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, indikatornya yang akan dicapai adalah jumlah dokumen

TABEL 5.1

Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi kegiatan	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Meningkatkan Penggunaan Ekonomi Daerah Sektor pariwisata	PAD Sektor pariwisata	Meningkatkan Kelestarian Budaya	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	% Pelaku seni budaya yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	100 %	45.000.000	100 %	48.471.322	100 %	56.175.441	100 %	66.962.445	100 %	80.934.212	100 %	297.543.420	Kebudayaan		
			2.16.15.05	Kegiatan : pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang mendapat penghargaan	-	-	-	3 orang	45.000.000	3 orang	45.000.000	3 orang		3 orang		3 orang		15 orang			Kebudayaan	Dalam daerah
					Jumlah karya cetak dan karya rekam yang tersedia	-	-	-	1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		5 buah			Kebudayaan	Dalam daerah
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	% Taman Publik dan sarpras pemerintah kabupaten	5 %	10 %	134.150.000	10 %	1.525.000.000	15 %	1.642.639.262	20 %	1.903.723.286	25 %	1.898.231.690	25 %	1.946.763.076	25 %	1.946.763.076	25 %	9.050.507.315	Kebudayaan			

		dengan kegiatan seni dan budaya aktif																		
2.16.1.6.1	Kegiatan : Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Taman Publik dan sarpras pemerintah kabupaten dengan kegiatan seni dan budaya aktif	1	2		2		3		4		5		5		5			Kebudayaan	Dalam daerah
		Prosentase sanggar seni yang mandiri	5 %	5 %	-	7 %	1.139.600.000	10 %	60.000.000	13 %	-	15 %	-	18 %	-	18 %	-		Kebudayaan	Dalam daerah
2.16.1.6.5	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dan dilestarikan	400 benda	410 benda		420 benda		430 benda		440 benda		450 benda		460 benda		460 benda			Kebudayaan	Dalam daerah
		Prosentase bangunan cagar budaya yang dipugar	-	-	-	-	500.000.000	1 bangunan	420.000.000	-	560.000.000	1 bangunan	560.000.000	-	580.000.000	2 bangunan			Kebudayaan	Dalam daerah
2.16.1.6.11	Kegiatan Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah rumah budaya (museum, galeri pameran, dan panggung pertunjukan)	-	-	-	1	-	-	660.000.000	-	736.000.000	-	809.000.000	-	890.000.000	-	975.000.000		Kebudayaan	Dalam daerah
2.16.1.7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	% pelaku seni budaya yang mendapat pembinaan,	100 %	100 %	1.488.470.000	100 %	2.245.000.000	100 %	2.418.180.422	100 %	2.802.530.346	100 %	2.794.445.995	100 %	2.865.890.562	100 %	14.614.517.325		Kebudayaan	
2.16.1.7.1	Kegiatan Pengembangan Kesenian	Jumlah budaya dan tradisi lokal	90 sanggar	30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		180 sanggar			Kebudayaan	Dalam daerah

	dan kebudayaan daerah	yang dibina berhasil (sanggar seni)																	h	
		Jumlah sanggar seni yang terdaftar	290 sanggar	310 sanggar	-	310 sanggar	1.300.000.000	320 sanggar	900.000.000	330 sanggar	1.122.000.000	340 sanggar	1.122.000.000	350 sanggar	1.286.890.562	350 sanggar	-	Kebudayaan	Dalam daerah	
2.16.17.5	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah prestasi seni budaya (penghargaan) pada tingkat regional, nasional, internasional	8	8		8		8		8		8		8		40		Kebudayaan	Dalam dan luar daerah	
		Jumlah even kesenian bertaraf regional, nasional dan internasional	4	5		9	1.205.000.000	9	1.594.622.000	10	1.680.530.346	10	1.672.445.995	10	1.579.000.000	10		Kebudayaan	Dalam dan luar daerah	
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	3.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pengunjung/wisatawan domestik dan manca negara dari berbagai segment asi pasar	924.544 org	1.019.310 org	1.398.185.000	1.432.456 org	1.445.000.000	1.575.016 org	1.556.468.022	1.732.286 org	1.803.855.835	1.905.544 org	2.150.238.509	2.096.098 org	2.598.887.461	9.760.710 org	10.952.634.827	Pemasaran dan kerjasama pariwisata	
	3.02.15.3	Kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah tenaga duta wisata yang dilatih	24 orang		538.3933.000	24 orang	345.000.000	24 orang	368.489.340	24 orang	427.347.634	24 orang	521.486.113	24 orang	636.213.057	120 orang		Pemasaran dan kerjasama pariwisata	Dalam dan luar daerah
	3.02.15.4	Kegiatan Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Persentase kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	3%	3%	125.000.000	5%	275.000.000	5%	291.489.341	5%	336.580.565	5%	360.040.680	5%	414.846.112	28%		Pemasaran dan kerjasama pariwisata	Dalam dan luar daerah
	3.02.15.5	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Jumlah Pameran pariwisata skala nasional	5	5	462.400.000	5	600.000.000	5	648.989.341	5	752.827.635	5	918.449.716	5	1.120.508.651	30		Pemasaran dan kerjasama	Dalam dan luar

		Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	maupun internasional															pariwisata	daerah
3.02.15.8	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang diberi pelatihan	10 pokdarwis	10 pokdarwis	40.300.000	10 pokdarwis	225.000.000	10 pokdarwis	247.500.000	10 pokdarwis	287.100.000	10 pokdarwis	350.262.000	10 pokdarwis	427.319.641	50 pokdarwis		Pemasaran dan kerjasama pariwisata	Dalam daerah
3.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah paket wisata lokal unggulan yang layak jual	-	-	180.750.000	1 Paket	1.830.000.000	1 Paket	1.971.167.115	1 Paket	2.284.467.943	1 Paket	2.277.878.028	1 Paket	2.336.115.692	5 Paket	10.880.378.777	3.02.16	
3.02.16.1	Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	DAK Pariwisata	-	-	-	1 paket		1 paket	1.381.000	1 paket	1.400.000	1 paket	1.390.000	1 paket	1.420.000	5 paket	5.000.000.000	3.02.16.1	Dalam daerah
3.02.16.2	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata	Persentase obyek wisata yang layak jual	16%	16%		18 %	727.000.000	20%	590.510.155	22%	734.467.943	24%	742.878.028	26%	756.115.692	26%	4.880.378.777	3.02.16.2	Dalam daerah
3.02.16.6	Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah even yang diselenggarakan di obyek wisata	-	-	180.750.000	1	1.103.000.000	1	121.450	1	150.000.000	1	145.000	1	160.000.000	5	1.000.000.000	3.02.16.6	Dalam daerah
3.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan/kerjasama yang dilakukan	1 tahun	1 tahun	440.249.500	1 tahun	460.000.000	1 tahun	495.484.630	1 tahun	574.237.844	1 tahun	572.581.362	1 tahun	587.220.338	1 tahun	3.129.773.674	3.02.17	
3.02.17.1	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah buku katalog pariwisata yang tersedia	1.000 buku	1.000 buku	55.600.000	1.000 buku	65.000.000	1.000 buku	15.000.000	1.000 buku	15.000.000	1.000 buku	17.000.000	2.000 buku	18.000.000	7.000 buku	300.000.000	3.02.17.1	Dalam daerah

		3.0 2.1 7.7	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga pariwisata yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	200 orang yang telah disertifikasi	50 orang	191.377.500	50 orang	75.000.000	50 orang	79.500.000	50 orang	89.500.000	50 orang	85.000.000	50 orang	90.000.000	250 orang	1.000.000.000	3.0 2.1 7.7	Dalam daerah
		3.0 2.1 7.8	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<i>Average length of stay (LoS)</i> wisatawan	1 hari	1,3 hari	179.850.000	1,5 hari	295.000.000	1,7 hari	337.354.630	2 hari	404.737.844	2,3 hari	406.581.362	2,5 hari	414.220.338	2,5 hari	1.629.773.674	3.0 2.1 7.8	Dalam daerah
		3.0 2.1 7.9	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pengusaha jasa pariwisata yang mendapat pembinaan	10 usaha	10 usaha	61.600.000	10 usaha	50.000.000	10 usaha	63.630.000	10 usaha	65.000.000	10 usaha	64.000.000	10 usaha	65.000.000	50 usaha	200.000.000	3.0 2.1 7.9	Dalam daerah

TABEL 5.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
PROGRAM-PROGRAM RUTIN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021	Bidang Pengu nggu ng Jawa b
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan pelayanan ASN pada masyarakat	ASN dan masyarakat	Meningkatkan pelayanan ASN pada masyarakat	3.02.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100 %	100 %	695.584.716	100 %	3.603.473.798	100 %	3.881.447.568	100 %	4.498.371.790	100 %	4.485.395.512	100 %	4.600.071.959	100 %	21.764.345.343	Sekretariat	
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telp, listrik dan air,	1 Tahun	1 Tahun	58.500.000	1 Tahun	287.666.000	1 Tahun	318.766.000	1 Tahun	344.267.280	1 Tahun	371.808.662	1 Tahun	382.962.922	6 Tahun	1.763.970.864		
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000	1 Tahun	108.800.000	1 Tahun	109.049.000	1 Tahun	117.772.920	1 Tahun	127.194.754	1 Tahun	131.010.597	6 Tahun	600.827.271		
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,	1 Tahun	1 Tahun	12.500.000	1 Tahun	57.400.000	1 Tahun	52.000.000	1 Tahun	56.160.000	1 Tahun	60.652.800	1 Tahun	62.472.384	6 Tahun	301.185.184		

			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Dinas	Jumlah Penyediaan Jasa Penyediaan Alat Tulis Dinas	1 Tahun	1 Tahun	40.000 .000	1 Tahun	69.140 .000	1 Tahun	75.20 0.000	1 Tahun	81.216 .000	1 Tahun	87.713 .280	1 Tahun	70.459 .260	6 Tahun	423.7 28.83 8
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,	1 Tahun	1 Tahun	13.500 .000	1 Tahun	30.000 .000	1 Tahun	60.90 0.000	1 Tahun	65.772 .000	1 Tahun	66.000 .000	1 Tahun	67.980 .000	6 Tahun	304.1 52.00 0
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Dinas	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Dina's	1 Tahun	1 Tahun	15.100 .000	1 Tahun	47.000 .000	1 Tahun	89.90 0.000	1 Tahun	97.092 .000	1 Tahun	104.85 9.360	1 Tahun	108.00 5.141	6 Tahun	461.9 56.50 1
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	139.27 5.216	1 Tahun	1.175. 200.00 0	1 Tahun	662.3 67.56 8	1 Tahun	715.35 6.973	1 Tahun	472.47 0.058	1 Tahun	486.64 4.160	6 Tahun	3.651 .313. 976
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	1 Tahun	1 Tahun	6.000. 000	1 Tahun	7.200. 000	1 Tahun	7.200. 000	1 Tahun	7.776. 000	1 Tahun	8.398. 080	1 Tahun	8.650. 000	6 Tahun	45.22 4.102
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman,	1 Tahun	1 Tahun	58.959 .500	1 Tahun	201.75 7.500	1 Tahun	160.8 40.00 0	1 Tahun	173.70 7.200	1 Tahun	187.60 3.776	1 Tahun	193.23 1.889	6 Tahun	976.0 99.86 5
			3.02.1.	Kegiatan : Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	102.79 0.000	1 Tahun	140.35 0.000	1 Tahun	794.2 50.00 0	1 Tahun	857.79 0.000	1 Tahun	858.71 6.413	1 Tahun	884.47 7.905	6 Tahun	3.638 .374. 318
			3.02.1.	Kegiatan : Penyediaan Tenaga pendukung kelancaran operasional	Jumlah Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Dinas	1 Tahun	1 Tahun	96.000 .000	1 Tahun	1.226. 400.00 0	1 Tahun	1.241. 591.0 00	1 Tahun	1.340. 918.28 0	1 Tahun	1.448. 191.74 2	1 Tahun	1.491. 637.49 4	6 Tahun	6.844 738.5 16

			3.02.6.	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	4.300.000	1 Tahun	4.631.000	1 Tahun	5.367.875	1 Tahun	5.791.305	1 Tahun	6.261.089	6 Tahun	26.357.268	
			3.02.6.	Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun,	1 Tahun	1 Tahun	15.300.000	1 Tahun	4.300.000	1 Tahun	4.631.000	1 Tahun	5.367.875	1 Tahun	5.367.875	1 Tahun	5.367.875	6 Tahun		
			3.02.6.	Kegiatan : Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Jumlah Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	4.300.000	1 Tahun	4.631.000	1 Tahun	4.631.000	1 Tahun	4.631.000	1 Tahun	6.893.410	6 Tahun		
			3.02.6.	Kegiatan : Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan DPA PD	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	4.300.000	1 Tahun	4.633.817	1 Tahun	5.367.877	1 Tahun	5.788.086	1 Tahun	6.261.089	6 Tahun		
			3.02.8	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	% tertib laporan dokumen perencanaan	100 %	100 %	4.200.000	100 %	4.300.000	100 %	4.631.704	100 %	5.367.875	100 %	5.792.500	100 %	6.419.16	100 %	30.711.249	Sekretariat

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD merupakan outcome program prioritas RPJMD yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai tugas fungsinya. Indikator tersebut juga mengacu pemenuhan indikator SPM Kesenian, dan pemenuhan indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dari uraian sebelumnya, maka aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus seni budaya

Pembangunan bidang seni, budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah grup kesenian.
 - b. Jumlah gedung kesenian.
2. Aspek Pelayanan Umum
- a. fokus layanan urusan wajib kebudayaan
 - 1). Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
 - 2). Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
 - 3). % jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dari total jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
 - b. fokus layanan urusan pilihan pariwisata
 - 1). Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
 - 2). % jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dari total PDRB Kabupaten Jember
3. Aspek Daya Saing
- 1) Jenis, kelas, dan jumlah restoran
 - 2) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah meningkatkan kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jember. Pada kinerja awal tahun 2016 diharapkan kunjungan wisatawan sebesar 1.202.500 orang. Pada akhir periode RPJMD 2021 kunjungan wisatawan mencapai 9.278.021 wisatawan. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2021 diharapkan pertumbuhan sebesar 7,5%.

Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dapat diketahui dalam perkembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember yang digambarkan pada Standard Pelayanan Minimal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

6.1. INDIKATOR KINERJA BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN 2017 -2021					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	KEBUDAYAAN									
1.1	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina dan berhasil (sanggar seni)	90 sanggar seni	30 sanggar seni	30 sanggar seni	30 sanggar seni	30 sanggar seni	30 sanggar seni	30 sanggar seni	180 sanggar seni budaya yang dibina	Disparbud
1.2	Rumah Budaya (museum, galeri pameran dan panggung pertunjukan)	-	-	1 rumah budaya	-	-	-	-	1 rumah budaya	Disparbud
1.3	Jumlah prestasi/penghargaan di bidang seni budaya pada level nasional, regional dan internasional :									
	a. Tingkat Regional	2	2	2	2	2	2	2	12	Disparbud
	b. Tingkat Nasional	4	4	4	4	4	4	4	24	Disparbud
	c. Tingkat Internasional	2	2	2	2	2	2	2	12	Disparbud
2	KESENIAN TRADISIONAL									
2.1	Jumlah grup kesenian	290	310	310	320	330	340	350	350	Disparbud
2.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	17	21	21	21	22	22	22	22	Disparbud
2.3	Persentase taman publik dan sarana prasarana pemerintah kabupaten dengan kegiatan seni budaya yang aktif (%)	5	10	10	15	20	25	25	25	Disparbud
2.4	Jumlah pelaksanaan even bertaraf nasional dan internasional:									

	a. Even bertaraf nasional	2	3	7	7	8	8	8	41	Disparbud
	b. Even bertaraf internasional	2	2	2	2	2	2	2	12	Disparbud
3	CAGAR BUDAYA									
3.1	Jumlah benda/situs dan kawasan cagar budaya (buah)	400	410	420	430	440	450	460	460	Disparbud

6.2. INDIKATOR KINERJA BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN 2017 -2021					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	DESTINASI PARIWISATA									
1.1	Persentase obyek wisata yang layak jual (%)	16	16	18	20	22	24	26	26	Disparbud
2	PEMASARAN PARIWISATA									
2.1	Jumlah wisatawan :									
	a. Nusantara	923.323	1.299.482	1.011.343	1.066.305	1.122.420	1.181.341	1.243.341	6.924.099	Disparbud
	b. Manca Negara	1.221	2.751	2.888	3.032	3.184	3.343	3.510	18.708	Disparbud
2.2	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	3,3 %	3 %	4.7 %	5.4 %	6.1 %	6.8 %	7.5 %	7.5 %	Disparbud
2.3	Persentase kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar /agency ((%))	3	3	5	5	5	5	5	5	Disparbud